KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Keinginan komisi V DPR, Jokowi - Anies duduk bersama cari solusi jitu masalah banjir
Tanggal : Sabtu, 29 Februari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Keinginan Komisi V DPR

Jokowi-Anies Duduk Bersama Cari Solusi Jitu Masalah Banjir

Senayan meminta pemerintah pusat dan daerah tak saling menyalahkan terkait banjir yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya. Seluruh elemen bangsa bisa duduk bersama mencari solusi permanen dalam mencegah dan mengatasi persoalan tersebut.

ANGGOTA Komisi V DPR Sukur Nababan mengatakan, sudah tak semestinya perbedaan politik terus dikedepankan di tengah berbagai persoalan bangsa. "Hentikan semua perbedaan politik. Jangan saling menyalahkan. Ayo duduk bareng-bareng selesaikan masalah banjir bersama-sama," ujar Sukur dalam diskusi bertajuk "Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?" di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sukur menegaskan, penanganan banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya tak boleh sepotong-sepotong dan harus terintegrasi. Kabupaten/kota tak bisa membuat kebijakan sendiri, provinsi membuat kebijakan sendiri, dan pemerintah pusat pembuat kebijakan sendiri. Dia berkeyakinan dengan kerja sama seluruh elemen, persoalan banjir di Jakarta dan wilayah sekitarnya bisa teratasi.

"Kita harus memasukkan satu aspek dari persoalan tersebut, yakni rakyat yang menjadi korban (banjir). Dampak yang ditimbulkan bukan hanya persoalan ekonomi, tapi ada dampak fisiologis yang akan dibawa oleh anak-anak, dan saudara-saudara kita sampai perkembangan pertumbuhan mereka," urai politisi PDIP itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie bilang, banjir merupakan fenomena alam yang memang sudah dapat diprediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Mesti banjir adalah fenomena alam, Komisi V DPR selalu konsen mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan kepentingan masyarakat akibat musibah tersebut.

"Makanya, kemarin, kami mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat (Jabar), dan Gubernur Banten untuk duduk bersama. Dengan pertemuan tersebut, kami berharap bisa mencari solusi bersama-sama untuk mengatasi permasalahan itu," kata Syarief.

Politikus Nasdem itu mengatakan, komisinya ingin ada satu suara dari pemerintah pusat dan daerah. Sebab, ada ranah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek penanganan banjir.

"Supaya ada satu suara atau persepsi yang sama antara pusat dan daerah, ya kita duduk bersama. Dengan duduk bersama, kita tidak berbalas pantun, tidak berbeda pandang," tegas dia.

Anggota Komisi V DPR, Irwan menyuarakan persoalan berbeda. Menurutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah layak mundur dari jabatannya. Sebab, dia tak memiliki empati terhadap korban banjir. "Ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lebih pasrah daripada korban banjir. Saya pikir layak mundur dari jabatan itu," geram Irwan.

Politikus Partai Demokat itu menuding banjir yang terus berulang selama bertahun-tahun juga dilatarbelakangi ketidakpahaman pemerintah untuk memitigasi atau upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana.

"Karena tidak paham, maka-nya terjadi bencana. Tidak bisa memitigasi sehingga bencana tiap tahunnya terjadi. Tidak pernah benar-benar duduk bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah ini," tandasnya. ■ ONI